ARTIKEL

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK)

Oleh:

MOH.ABDUL SYUKUR

NPM : 14.1.02.01.0036

Dibimbing oleh :

1. **Dr.M.Anas, M.M., M.Si., Ak., CA**
2. **Dra.Puji Astuti, M.M., M.Si., AK**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: MOH.ABDUL SYUKUR
NPM	: 14.1.02.01.0036
Telepun/HP	: 0823 3152 9210
Alamat Surel (Email)	: mohabdulsyukur4@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Peundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk)
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karyasaya pribadi (bersamatim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apa bila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 30 Juli 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dr.M.Anas, M.M.,M.Si.,Ak.,CA **NIDN.0028106601**	**Dra.Puji Astuti, M.M.,M.Si.,AK** **NIDN.0710106402**	**Moh.Abdul Syukur** **NPM.14.1.02.01.0036**

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PEUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK)

MOH.ABDUL SYUKUR
14.1.02.01.0036
Ekonomi - Akuntansi
mohabdulsyukur4@gmail.com
Dr.M.Anas, M.M.,M.Si.,Ak.,CA dan Dra.Puji Astuti, M.M.,M.Si.,AK
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan membawa dampak terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan membawa terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Badan Pendapandan Daerah Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh seccara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3) ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4) sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simulta berpegaruh signifikan terhadap akuntabilas kinerja instansi pemerintah.

KATA KUNCI : Sistem Akuntansi, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Peraturan Perundangan dan Akuntabilitas kinerja.

I. LATAR BELAKANG

Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab

dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* (LAN dan BPKP,2000 : 1). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan

akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada tiga pemerintah daerah. Kali ini daerah yang menerima LHP dari BPK adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk.Penyerahan LHP BPK ini bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD ketiga entitas tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang, serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan opini ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang berhasil

mempertahankan opini WTP, sedangkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk turun opini dari tahun lalu yang memperoleh WTP.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan BPK terletak pada komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta dalam menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. "BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel," (http://surabaya.bpk.go.id/new/?p=17380).

Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah secara parsial Pemahaman Akuntansi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah secara parsial Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?
4. Apakah secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Peraturan Perundangan

Berdasarkan identifikasi diatas, dapat diambil tujuan peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara parsial pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Untuk menguji secara parsial pengaruh Peraturan Perundangan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Untuk menguji secara simultan pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah?

II. METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 21 orang dan Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh pegawai di bidang akuntansi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang berjumalah 21 orang

Pendekatan dan Jenis Analisis Data

Sejalan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunaan pendektan kuantitatif, dengan jenis analisis data statistik inferensial yaitu untuk menganalisis data tentang keseluruhan populasi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimmpilan yang berlaku untuk umum dan generalisasi

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Data primer penelitian ini diperoleh melalui sebuah kuisoner. Dimana peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang berisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut, jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2013:52).

Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47).

Analisis Liniear Berganda

analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasikan atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011:13). Model persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_2$$

Uji Normalitas

Uji normalitas data yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak.Untuk mendeteksi suatu data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat menggunakan analisis grafik. Jika distribusi residual normal, maka garais yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013:106).

Uji Multikoloneritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen untuk mendekteksi ada atau tidaknya multikolinearitas maka dilakukan dengan melihat *Toleraance Value* dan *Variance Inflantion Factor* (VIF). (Ghozali, 2013:105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang hemokedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011:139).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variansi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nila R^2 yang kecil berarti berarti kemampuan variabel – variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji parsial (t test) regresi dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima (Ghozali, 2013:98).

Uji Hipotesis Secara Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 (α = 5%) (Ghozali, 2011:66).

III. Hasil dan Kesimpulan

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Colleration (Validitas)	Signifikan	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.538** - 0.757**	0.001 – 0.000	Valid
Pemahaman Akuntansi	0.561** - 0.852**	0.000 – 0.000	Valid
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.587** - 0. 838**	0.000 – 0.000	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.506** - 0.803**	0.002 – 0.000	Valid

Sumber : Hasil di olah dari *output* SPSS

Berdasar tabel diatas dapat diketahui r hitung dari semua variabel (sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dalam semua item pertanyaan adalah valid karena r hasil > 0,5. Pembuktian ini menunjukan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (*laten variabel*)

Uji Realibitas

Tabel 2
Hasil Uji Realibitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.706	*Reliable*
Pemahaman Akuntansi	0.909	*Reliable*
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.785	*Reliable*
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.928	*Reliable*

Sumber : Hasil di olah dari *output* SPSS

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* (α) untuk instrumen penelitian yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0.60 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrument untuk masing-masing variabel adalah *reliable*

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized coefficient
		B	Std.Error	Beta
1	(Constant)	-1.422	2.365	
	SAPD	.066	.104	.137
	PA	.087	.069	.263
	KPPP	.213	.117	.448

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Hasil *output* SPSS

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

$$AKIP = -1{,}422 + 0{,}066\ SAPD + 0{,}087\ PA + 0{,}213\ KPPP + \varepsilon$$

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel	Kolmogorov-Smirnov-Test	Asymp.Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1. 117	0.165	Distribusi Normal
Pemahaman Akuntansi	0.939	0.342	Distribusi Normal
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0.935	0. 346	Distribusi Normal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.231	0.097	Distribusi Normal

Sumber : Hasil di olah dari *output* SPSS

Hasil pengujian normalitas data dengan *Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*, menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* untuk sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 0.165 > 0.05, pemahaman akuntansi sebesar 0.342 > 0.05, ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0.346 > 0,05, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.097 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdisribusi secara normal.

Uji Mulikolinieritas

Tabel 4

Hasil Uji Mulikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SPAD	.603	1.658
	PA	.351	2.849
	KPPP	.480	2.085

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Hasil *output* SPSS

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF pada Tabel 4.20 di atas, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

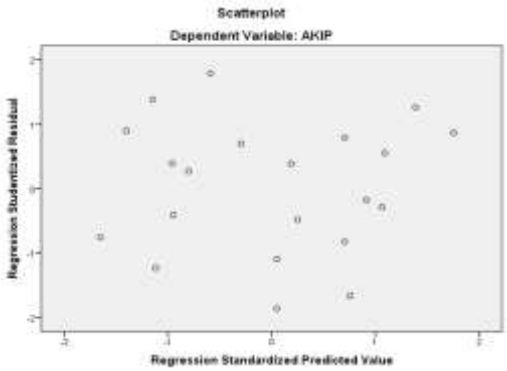

Sumber : Hasil *output* SPSS
Gambar 1

Bedasarkan gambar 1 diatas ditunjukan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tidak menunjukan pola tertentu, tersebar baik diatas maupun dibbawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukan bahwa model tersebut sesuai dengan dasar pegambilan keputusan, sehingga berdasarkan hasil uji tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 5

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992[a]	,919	,830	1,33929	1,920

a. Predictors: (Constant), KPPP, SAPD,PA
b. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Hasil *output* SPSS

Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Besarnya sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatatan pada pertauran perundangan dapat mejelaskan perubahan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,830. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada

peraturan pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah berbengaruh sebesar 83%.

Tabel 6
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	-1.422	2.365		-1.763	.088
SAPD	.066	.104	.137	3.443	.002
PA	.087	.069	.363	3.115	.004
KPPP	.213	.117	.448	3.810	.001

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Hasil *output* SPSS

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh uji sebagai berikut :

a. Pengujian hipotesis 1

H_o : $b_1 = 0$, sistem akuntansi pemerintah daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja intsansi pemerintah.

H_a : $b_1 \neq 0$, sistem akuntansi pemerintah daerah (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tabel 4.23 diatas diketahui bahwa nilai signifikan sistem akuntansi keuangan daerah < 0,05 yang berarti H_O ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Pengujian hipotesis 2

H_o : $b_2 = 0$, pemahaman akuntansi (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H_a : $b_2 \neq 0$, pemahaman akuntansi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah.

Berdasarkan tabel 4.23 diatas diketahui bahwa nilai signifikan pmahaman akuntansi < 0,05 yang berarti H_o ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Pengujian hipotesis 3

H_o : $b_3 = 0$, ketaatan pada peraturan perundangan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah.

H_a : $b_3 \neq 0$, ketaatan pada peraturan perundangan (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tabel 4.23 diatas diketahui bahwa nilai signifikan ketaatan pada peraturan perundangan < 0,05 yang berarti H_o ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa ketaatan peraturan pada perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji F (secara simultan)

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,933	3	145,978	56,238	.000[b]
	Residual	85,467	17	2,596		
	Total	46,952	20			

a. Dependent Variable: AKIP
b. Predictors: (Constant), SAPD, PA, KPPP

Sumber : Hasil *output* SPSS

a. Pengujian hipotesis 4

H_o : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, sistem akuntasi pemerintah daerah (X_1), pemahaman akuntansi (X_2) dan ketaatan pada peraturan (X_3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, sistem akuntasi pemerintah daerah (X_1), pemahaman akuntansi (X_2) dan ketaatan pada peraturan perundangan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Berdasarkan hasil uji tabel 4.24 diatas diketahui bahwa nilai signifikan uji F variabel sistem akuntasi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan < 0,05 yang berarti H_o ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

IV. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai sistem akuntansi pemerintah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

1. **Sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

   Berdasarkan tabel hasil uji diperoleh nilai signifikan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 0,002 dan hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntasi pemerintah daerah < 0,05, yang berarti sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk.

2. **Pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas secara kinerja instansi pemerintah.**

   Berdasarkan tabel uji diperoleh nilai signifikan variabel pemahaman akuntansi sebesar 0,004 dan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi <0,05, yang berarti Pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas secara kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk.

3. **Ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

   Berdasarkan tabel uji diperoleh nilai signifikan variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,001 dan hasil tersebut menunjukan bahwa pemahaman akuntansi <0,05 yang berarti Ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk.

4. **Sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah**

Berdasarkan tabel hasil uji diperoleh nilai signifikan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan pemerintah sebesar 0,000 dan hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah <0,05 yang berarti sistem akuntansi, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan secara simultan bepengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

V. DAFTAR PUSTAKA

Fatmala, Juanita (2014). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah". Universitas Bengkulu.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Rianto, Azlina. 2011. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi,& ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" (Studi pada SKPD kota pekanbaru).

Keputusan LAN No.239/IX/6/8/2003 *tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinterja Intansi Pemerintah.*

BPK Surabaya, 2016. http://surabaya.bpk.go.id/new/?p=17380. Tanggal akses 20 Desember 2017.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan.*

Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Halim. Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Setandar Akuntansi Pemerintah.*

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sanusi , Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate Program*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenegoro